

S  
352.407  
Fad  
a  
2008  
e-080533

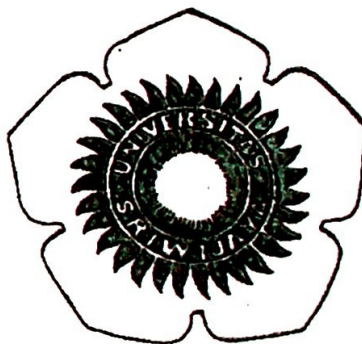


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM DAN  
KESENJANGAN FISKAL KOTA PALEMBANG**

R.16981  
17863



**Diajukan Oleh:**

**RAHMA FADHILAH  
NIM.01043120030**

**Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat**

**Guna Mencapai Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**2008**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


NAMA : RAHMA FADHILAH  
NIM : 01043120030  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM  
DAN KESENJANGAN FISKAL KOTA PALEMBANG

**PANITIA PEMBIMBING SKRIPSI**

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal, Maret 2008 Pembimbing I :   
Prof. Hj. Nurlina Tarmizi, M.Si, PhD  
NIP : 130516788

Tanggal, Maret 2008 Pembimbing II :   
Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP : 131673869

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI  
INDERALAYA**

**TANDA PERSETUJUAN PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : RAHMA FADHILAH  
NIM : 01043120030  
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN  
MATA KULIAH : KEUANGAN DAERAH  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERIMAAN DANA ALOKASI UMUM  
DAN KESENJANGAN FISKAL KOTA PALEMBANG

Telah dipertahankan di depan panitia ujian komprehensif pada tanggal 9 Mei 2008 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Inderalaya, Mei 2008

Ketua,

Anggota,

Anggota,



Prof. Hj. Nurlina Tarmizi, M.Si, PhD  
NIP. 130516788



Dr. H. Didik Susetyo, M.Si  
NIP. 131673869



Dr. Azwardi, M.Si  
NIP. 132050494

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Taufiq Marwa, M.Si  
NIP. 132050493

## Motto dan Persembahan

*Kebodohan merupakan tanda kematian jiwa, terbunuhnya kehidupan, dan membusuknya umur.*

*(DR, Aidh al-Qarri)*

*"Sesungguhnya aku mengingatkan kepadamu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan."*

*(QS. Hud: 46)*

*"Pelajarilah ilmu. Barang siapa mempelajarinya karena Allah, itu takwa. Menuntutnya, itu ibadah. Mengulang-ngulangnya itu tasbih. Membahasnya itu jihad. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu, itu sedekah. Memberikan kepada ahlinya, itu mendekatkan diri Kepada Allah."*

*(Abusy Syaikh Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, Ihya Al-Ghozali, 1986)*

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*  
♥ Ayahanda H. Azrai Amran dan  
Ibunda Hj. Yatinur tercinta  
♥ Uni Dona dan Uda Yadi  
♥ keponakanku Fawwaz tersayang  
♥ Almamaterku



## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillah dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Judul penelitian ini adalah "Analisis Penerimaan Dana Alokasi Umum dan Kesenjangan Fiskal Kota Palembang". Teknik Analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan korelasi pearson. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2001 sampai 2006 yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik(BPS) Propinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang, literatur-literatur, dan penelitian terdahulu.

Penulis sadar menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan hati terbuka dan rasa terima kasih. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamualaikum Wr, Wb.**

Palembang, 31 Maret 2008

Penulis

**(Rahma Fadhilah)**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan setulus hati, kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Secara Khusus penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT yang memberikan keberkahan, kemudahan, dan petunjuk dalam menjalani hidup.
2. Ibu Prof. Dra. Badia Perizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Dr. Syamsurijal AK, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan .
5. Ibu Prof. Hj. Nurlina Tarmizi, M.Si, PhD selaku Ketua Panitia Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku Anggota Pembimbing Skripsi yang telah membantu memberikan pengarahan hingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Dr. Azwardi, M.Si selaku Dosen Tamu Penguji Komprehensif.
8. Bapak Drs. Suhel, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik.
9. Dosen-dosen, staf-staf, dan pegawai Fakultas Ekonomi, khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah berjasa dalam memberikan ilmu dan pendidikan kepada penulis selama di bangku kuliah.
10. Kepada kedua Orang tua ku H.Azrai Amran dan Hj. Yatinur, BA. yang selalu memberikan kehangatan dalam hidupku. Memotivasiku agar aku menjadi anak yang solehah, berhasil dalam menjalani hidup. Semoga kita berkumpul di surga nanti, Amin.
11. Kepada Uni Dona dan kakak iparku Uda Yadi, dan tentunya keponakanku Fawwaz, Terima kasih atas semua bantuan yang sudah diberikan.
12. Kak haris, Makasih atas semuanya, atas kesabarannya, penyelesaian skripsi ini nggak lepas dari bantuan kakak, mudahan-mudahan Allah kasih

keridhoannya untuk 19092000. Semoga hari, bulan, dan tahun itu datang juga, Amin.

13. Sahabat -sahabatku yang setia dalam suka maupun duka, Hilda, Ayu, Nora, Rani, Gita, Mira, Tiur, Intan, Yulia, dan Mayan, Semoga persahabatan kita tidak habis di makan waktu, yakinlah Allah sudah berikan yang terbaik bagi persahabat kita ini, secara kita punya karakter yang beda jauh, Allah satukan kita di FE UNSRI...
14. Buat Hilda, makasih atas persahabatan ini. Mulai dari awal hingga ujung kuliah, meskipun di hari-hari pengerjaan skripsi kita jarang ketemu, tapi dila yakin hati kita yang selalu ketemu.
15. Buat Ayu n Nora, makasih banyak ya..udah sering ngasih saran,bantuan, n ilmunya (ilmu apapun itu) untuk dila selama kuliah, mudahan-mudahan kita masih sering ngumpul walaupun udah nggak ngampus lagi, tentunya di rumah uya yang teteup jadi bascampnya,,otre...
16. Buat Gita, Mira n Rani, Walaupun kita jarang sharing tapi dila yakin persahabatan itu nggak dilihat dari banyaknya sharing each other, tapi menghargai satu sama lain lebih dari arti sharing itu. setuju??
17. Buat yulia, Tiur n Intan, Meski kalian meninggalkan kampus lebih dulu dari kami ber 8, tapi kami yakin hati kalian tetap bersama kami, doa dila untuk kemajuan kalian semua, semoga dapet good job ya,,doai dila juga ya, mudah2n bisa cepet dapet kerja..
18. Buat Mayan, gimana skripsinya?? Ayo mayan,,jangan sibuk sama bisnisnya, kuliah harus jadi prioritas, key..Tapi dila yakin mayan pasti bisa mengejar target di bulan september,,,semangat mayan...Makasih ya mayan udah jadi sahabatku.....
19. Teman- teman Ekonomi Pembangunan 2004, Mei-tse (akhirnya kita jadi sarjana ekonomi juga mei,,makasih ya mei udah sering ngebantui dila dalam hal apapun selama kuliah, dila sayang mei), buat Yuni (makasih ya yun udah sering dengeri curhat dila, yuni tempat curhat yang baik, semoga yuni sukses dalam menjalani hidup ini) buat Berti, Salwah, Fatma, Dwi, Amel, Asti, Ella, Vita, Ummi, Ratih, Tri, Citra, Metta, Ahyar, Tommi, Metta Cowok, Tobo, Ejak, Huda, Irfan, Isman, dan lain-lain yang tidak

bisa disebutkan satu persatu. Makasih atas semuanya, dibalik kesuksesan tidak terlepas dari pertolongan dan bantuan dari kalian semua.

20. Buat Kak adi jurusan, makasih banyak ya kak bantuannya, apalagi kakak sering dibuat repot oleh dila selama menunggu jadwal kompre, repot terima telpon dila, n repot fotokooi Disertasi pak didik.(he..he..)
21. Buat yuk semi dekanat, ayuk super duper pengertiaanya, walaupun lagi repot tapi tetep sabar n santai nanggapi kami,,makasih ya yuk...
22. Buat anak Ekonomi Pembangunan angkakan 2005, Ina, Esti, dan lain-lain karena tidak begitu banyak tau nama,,,Makasih ya dek...atas bantuan kalian....cepat-cepat tamat ya dek..sukses selalu..

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu selama perkuliahan sampai selesai skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan atas budi baiknya dan keberkahan pada kita semua, Amin.

Palembang, 6 April 2008

Penulis

Rahma Fadhilah

## ABSTRACT

This research aim to analyze influence or relation between fiscal gap of Palembang City with acceptance block grant of Palembang City. All of data used by writer based on secondary data 2001-2006 periods from Departement of state income (DISPENDA) Palembang, Investigation of statistics (BPS) in Sumatera Selatan and other related resort. One way to know level of fiscal gap, the writer counted difference between fiscal needs with fiscal capacities. Method of analysis used linear regresion modestly and correlation pearson. The result of research indicate that there are influence of equal to 84 gratuity between fiscal gap of Palembang city with acceptance block grants of Palembang City, and then there are positive and strong correlation between variable of fiscal Gap of Palembang City (Expense area, Gross of Domestic Regional Product, Standard of Fiscal Needs, and Standard of Fiscal Capacities) with acceptance block grant of Palembang City.

*Key Words* : Fiscal Gap, Block Grants, Fiscal Capacity, Fiscal Needs.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan.....	7
I.4 Manfaat.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Konsep Penerimaan Pemerintah.....	8
2.1.2 Konsep Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal.....	11
2.1.3 Teori Pajak.....	12



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh dan hubungan antara Kesenjangan Fiskal Kota Palembang dengan Penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang. Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah data sekunder periode tahun 2001-2006 dari Dinas Pendapatan daerah Kota Palembang, Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, serta instansi terkait lainnya. Salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang yaitu dengan menghitung selisih antara Kebutuhan Fiskal Kota Palembang dan Kapasitas Fiskal Kota Palembang. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan korelasi pearson. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh sebesar 84 persen antara Kesenjangan Fiskal Kota Palembang dengan Penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang, lalu terdapat Korelasi positif dan kuat antara variabel Kesenjangan Fiskal Kota Palembang (Belanja daerah perkapita Kota Palembang, PDRB Perkapita Kota Palembang, Standar Kebutuhan Fiskal dan Kapasitas Fiskal Standar) dengan Penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang.

**Key Words** : Kesenjangan Fiskal, Dana Alokasi Umum, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	6
I.3 Tujuan.....	7
I.4 Manfaat.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Konsep Penerimaan Pemerintah.....	8
2.1.2 Konsep Kebutuhan dan Kapasitas Fiskal.....	11
2.1.3 Teori Pajak.....	12





## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1 Model Kerangka Pikir Penelitian.....</b>	<b>19</b>
--	-----------

## DAFTAR GRAFIK

<b>Grafik 4.1 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Palembang Tahun 2001-2006.....</b>	<b>35</b>
<b>Grafik 4.2 Perkembangan Jumlah Penerimaan DAU Kota Palembang Tahun 2001-2006.....</b>	<b>40</b>
<b>Grafik 4.3 Perkembangan Belanja Daerah Perkapita Kota Palembang Tahun 2001-2006.....</b>	<b>44</b>
<b>Grafik 4.4 Rata-rata Belanja Daerah Perkapita 7 Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2001-2006.....</b>	<b>45</b>
<b>Grafik 4.5 Perkembangan PDRB Kota Palembang Tahun 2001-2006.....</b>	<b>48</b>
<b>Grafik 4.6 Perkembangan PDRB Migas Harga Konstan Perkapita Kota Palembang Tahun 2001-2006.....</b>	<b>50</b>
<b>Grafik 4.7 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Tahun 2001-2006.....</b>	<b>50</b>
<b>Grafik 4.8 Perkembangan Kesenjangan Fiskal Kota Palembang Tahun 2001-2006.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran I</b>	<b>Perhitungan Kebutuhan Fiskal Kota Palembang</b>	
	<b>Periode 2001-2006.....</b>	<b>74</b>
<b>Lampiran II</b>	<b>Perhitungan Kapasitas Fiskal Kota Palembang</b>	
	<b>Periode 2001-2006.....</b>	<b>75</b>
<b>Lampiran III</b>	<b>Perhitungan Kesenjangan Fiskal Kota Palembang</b>	
	<b>Perode 2001-2006.....</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran IV</b>	<b>Hasil Regresi Pengaruh Kesenjangan Fiskal Kota</b>	
	<b>Palembang terhadap Penerimaan Dana Alokasi Umum</b>	
	<b>Kota Palembang Perode 2001-2006.....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pengembangan dan pelaksanaan sistem otonomi daerah di Indonesia telah mewujudkan struktur pemerintahan negara yang bersifat desentralisasi. Struktur pemerintahan ini menuntut suatu sistem keuangan daerah di bawah pengawasan pusat yang dapat menjamin kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya sebagai pelaku unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang-barang publik (Suparmoko, 2002: 16).

Pelaksanaan otonomi daerah tersebut didasarkan atas kebijakan fiskal dan ekonomi daerah yang bertujuan mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pengurangan subsidi Dana Perimbangan terutama dari Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat, serta mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasinya. Hal inilah yang mendasari terwujudnya desentralisasi fiskal di Indonesia. Desentralisasi fiskal diupayakan untuk mengurangi pola ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat selama era pra-reformasi telah terjadi sehingga daerah dituntut lebih mandiri dalam segala aspek. Pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi seluruh kewenangan pemerintah kabupaten / kota dalam pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari aspek penerimaan dan pengeluaran (Mangkoesebroto dalam Hidayat, 2006: 1).

Desentralisasi fiskal menurut Boex (dalam Septiani, 2007: 3) terdiri dari empat unsur yaitu: *Pertama*, penerimaan (*receipt*), berhubungan dengan sumber penerimaan daerah termasuk pajak dan bukan pajak yang menjadi wewenang pemerintah daerah. *Kedua*, pengeluaran (*expenditure*), berhubungan dengan fungsi dan tanggung jawab atas segala pengeluaran untuk masing-masing tingkatan pemerintahan. *Ketiga*, pinjaman atau hutang (*loans*), berhubungan dengan akibat yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran sehingga menyebabkan terjadinya defisit daerah, dan *Keempat*, transfer, berhubungan dengan penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah sebagai pokok utama dari desentralisasi fiskal tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini membutuhkan dana dalam jumlah besar dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga diperlukan usaha untuk mengimbangi kegiatan dari pembangunan itu sendiri. Dengan demikian pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Disamping itu, dengan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih memuaskan, pengurangan beban pemerintah pusat, pertumbuhan kemandirian daerah serta penyusunan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah (Rasyid, 1998: 2).

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan hal tersebut adalah tersedianya sumber-sumber penerimaan daerah, dalam Undang-Undang No. 33

Tahun 2004, dinyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah terdiri dari 4 kelompok, yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan Pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur kemandirian fiskal suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan Pendapatan Asli Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal daerah. Sementara untuk mengukur tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah maka dapat dilihat dari penerimaan Dana alokasi umum, dimana semakin besar penerimaan Dana alokasi umum suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat ketergantungan fiskal suatu daerah tersebut (Insukindro dalam Ismail 2002: 2).

Sementara rendahnya efektifitas dan efisiensi penerimaan PAD dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber yang masuk dalam kategori PAD umumnya bukan sumber potensial daerah. Sumber potensial diambil pemerintah pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber yang kurang potensial. Oleh sebab itu dapat dikatakan daerah sangat membutuhkan penerimaan dana perimbangan, karena dengan dana perimbangan daerah dapat menutupi kebutuhan fiskal daerahnya masing-masing, dan Salah satu penerimaan dana perimbangan yang cukup besar bagi daerah yaitu Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersifat (*block grant*) dengan tujuan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah

dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat. DAU dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk (*horizontal equity*) dan (*sufficiency*) (Mardiasmo, 2004: 157). Tujuan *horizontal equity* merupakan kepentingan pemerintah pusat dalam rangka melakukan distribusi pendapatan secara adil dan merta agar tidak terjadi kesenjangan antar daerah. Untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAU yang bersifat (*block grant*) berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. DAU terdiri atas DAU untuk Provinsi dan DAU untuk Kabupaten/Kota, dimana proporsinya ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten. Sejauh ini masih terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan DAU, pemerintah pusat bermaksud mengurangi ketergantungan kesenjangan antar daerah dalam pembiayaan pembangunan (*horizontal equity imbalance*). Disisi lain, pemerintah daerah lebih berorientasi pada kecukupan dalam membiayai pembangunan daerah (*sufficiency*). Tuntutan pembagian yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah muncul dari daerah yang kaya akan SDA (Hamid, 2005: 5).

Formula alokasi DAU masih menimbulkan keberatan dari daerah, pemerintah daerah menganggap alokasi DAU yang diterima tidak memadai dan belum dapat mencukupi kebutuhan fiskal daerahnya. Kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) adalah kebutuhan fiskal (*fiscal Needs*) dikurangi kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Munculnya kesenjangan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah

antara lain bersumber dari kesenjangan pembiayaan dan ketidakpastian asumsi dan formulasi yang digunakan untuk menentukan pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Formula Alokasi DAU dikembangkan dengan memegang prinsip sederhana dalam arti dapat dijelaskan dan mudah dimengerti oleh semua pihak, dengan harapan daerah dapat menghitung sendiri alokasi DAU yang akan diterima. Masyarakat dapat menghitung sendiri berapa besar kebutuhan dan kapasitas fiskal daerahnya masing-masing, dengan begitu daerah akan lebih fokus dalam pembangunan daerahnya, implikasi dari kesemua ini adalah kinerja keuangan daerah akan semakin meningkat, karena prinsip dari Dana Alokasi Umum itu sendiri yaitu pemberian subsidi yang penerimaannya didasarkan pada pendekatan kesenjangan fiskal, dimana kesenjangan fiskal itu sendiri sudah dapat dihitung oleh daerahnya sendiri.

Kota Palembang merupakan salah satu kota yang menjalankan sistem desentralisasi fiskal, dimana sumber penerimaan terbesar daerah Kota Palembang itu sendiri masih dari dana perimbangan, ini terlihat dari total penerimaan DAU masih dominan dibanding penerimaan daerah yang lain. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kota Palembang terhadap subsidi dari pemerintah pusat sangatlah besar, hal ini dapat disebabkan minornya sumber penerimaan daerah. Masalah utama yang dihadapi oleh Kota Palembang setelah pelaksanaan otonomi daerah yaitu dapat dilihat dari aspek keuangan daerah, dimana masih sering terbentuk pertanyaan, apakah sudah terjadi hubungan keuangan yang adil dan transparan antara pemerintah pusat dan daerah.



Ada tiga aspek yang menentukan terjadinya hubungan keuangan yang adil, yaitu (1) sejauh mana daerah telah diberi sumber-sumber penerimaan keuangan yang cukup, (2) Sejauh mana daerah mampu menentukan secara objektif jumlah biaya yang cukup untuk pelayanan publik, hal ini dicerminkan pada kebutuhan fiskal pemerintah daerah, (3) Sejauh mana daerah telah mendapat subsidi yang adil dan terukur untuk membiayai fiscal gap yang ditimbulkan dari selisih antara fiscal needs dan fiscal capacity, dimana dengan pendekatan kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) maka pemerintah pusat dapat memberikan dana alokasi umum dengan berorientasi pada kecukupan dalam membiayai pembangunan daerah (*sufficiency*) (Roflin, 2007: 7).

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Berapa besar tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang?
2. Bagaimana Pengaruh tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang?
3. Bagaimana korelasi (hubungan) antara variabel tingkat Kesenjangan Fiskal (Belanja daerah perkapita Kota Palembang, Standar Kebutuhan Fiskal, PDRB perkapita Kota Palembang dan Kapasitas Fiskal Standar) terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan yang ada, tujuan yang hendak penulis inginkan dalam menulis sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui Pengaruh tingkat Kesenjangan Fiskal Kota Palembang terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang
3. Untuk mengetahui bagaimana korelasi (hubungan) antara variabel tingkat Kesenjangan Fiskal (Belanja daerah perkapita Kota Palembang, Standar Kebutuhan Fiskal, PDRB perkapita Kota Palembang dan Kapasitas Fiskal Standar) terhadap penerimaan Dana Alokasi Umum Kota Palembang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

#### **A. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengembangan teori melalui model yang berkaitan dengan Dana Alokasi Umum

#### **B. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah kota Palembang berkaitan dengan alokasi Dana Alokasi Umum dan pemanfaatannya

## DAFTAR PUSTAKA



- Astuti, Ester. 2005. Analisis Dana Alokasi Umum dalam era otonomi daerah. Studi kasus 30 Provinsi. *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia* No.12/th xxxiv. Desember. 2005.
- Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Selatan. 2005. *Sumatera Selatan Dalam Angka 2004*. Palembang: BPS.
- Davey, K. 1993. *Currents Trends in Local Government Finance in Eastern and western Europe*. The New York: Dryden Press.
- Departemen Dalam Negeri. 1999. *Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Jakarta: Panca Usaha.
- Departemen Dalam Negeri. 2004. *Undang-undang RI No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*. Jakarta: Panca Usaha.
- Hamid, E. 2005. *Formula Alternatif Dana Alokasi Umum Upaya Mengatasi Ketimpangan Fiskal dalam era Otonomi Daerah*. Hasil yang dibukukan UII Press. Yogyakarta.
- Hariyadi. 2001. *Pengaruh penerimaan dan belanja daerah terhadap derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Belitung*. Skripsi S1 Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan
- Hidayat, Dian. 2006. *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Derajat Otonomi Fiskal Kota Palembang*, Skripsi S1 Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan
- Ismail. 2002. *Analisis Pendapatan Asli daerah kota Palembang*. Skripsi S1 Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan
- Kuncoro, M, Saleh, & ARSYAD, L. 1994, *Desentralisasi Fiskal : Tinjauan dan Implikasinya Bagi Repelita VI*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UGM.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Ekonomi dan Pembangunan daerah, Reformasi : Perencanaan strategi, dan Peluang*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Mangkoesobroto, Guritno. 2002. *Ekonomi Publik Edisi 3*. Yogyakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka.

- Mardiasmo. 1999. *The Impact of central and Provincial Government Intervention on local Government Budgetary Management*. USA: Departement School of Public Policy.
- Nugroho, D Riant. 2002. *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo Kelompok Erlangga.
- Rasyid. 1990. *Bunga Rampai Keuangan Daerah*. Jakarta: Tanita Jaya.
- Roflin, Eddi. 2007. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Dana Alokasi Umum di Sumatera Selatan*. Tesis Pasca sarjana Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan
- Septiani, Reni. 2007. *Analisis Pengaruh PAD dan Jumlah Penduduk terhadap Pengeluaran Pemerintah Kota Palembang*, Skripsi S1, Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk keuangan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Sutrisno PH, *Ekonomi Publik II*, Kerunika, Jakarta, Universitas Terbuka, 1996, Halaman 5.
- Widjaja. HAW. 2001. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yukanti. 2004. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. UII Press. Yogyakarta.
- Zahmanidar. 2005. *Analisis kinerja keuangan daerah dalam era otonomi daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu*. Skripsi S1 Universitas Sriwijaya. Tidak dipublikasikan